

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan suatu bangsa sebagian besar didukung oleh sistem pendidikannya. Pendidikan sangat penting dalam membentuk pengetahuan, kemampuan, dan karakter generasi muda yang akan memimpin Indonesia di masa depan. Pendidikan adalah tulang punggung dan dasar bangsa. Untuk bersaing secara global dan memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan, Indonesia akan membutuhkan sistem pendidikan yang kuat dan adil.

Ada banyak cara untuk melihat peran yang dimainkan pendidikan dalam pembangunan suatu negara. Pertama, sumber daya manusia yang lebih baik dihasilkan melalui pendidikan. Orang-orang memperoleh informasi dan kemampuan yang diperlukan untuk secara aktif terlibat dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi melalui pendidikan. Selain menghasilkan pekerja terampil, pendidikan yang berkualitas juga menghasilkan inovator dan pemikir kritis yang dapat menemukan jawaban atas masalah yang dihadapi negara.

“Pendidikan yang berkualitas adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan dan ketidaksetaraan,” kata pakar pendidikan terkemuka Prof. Anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah dapat meningkatkan prospek masa depan mereka melalui sekolah. Terlepas dari status sosial ekonomi keluarga seseorang, pernyataan ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka potensi penuh seseorang dan menaiki tangga ekonomi.

Kedua, pendidikan membentuk prinsip moral dan karakter generasi berikutnya. Pendidikan karakter dimasukkan ke dalam kurikulum untuk mengajarkan siswa nilai kejujuran, ketekunan, akuntabilitas, dan toleransi. Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan damai. Indonesia dapat menghasilkan generasi pemimpin yang memiliki nilai

moral yang kuat selain kecerdasan dengan mengedepankan pendidikan karakter.

Arief Rachman, seorang pakar pendidikan dan Ketua Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, mengatakan bahwa pendidikan karakter harus menjadi komponen fundamental dalam sistem pendidikan kita. Tujuan kami dalam mendidik anak-anak adalah untuk membantu mereka berkembang menjadi orang dewasa yang berakhlak mulia, bukan hanya menjadi pemikir yang brilian.

Pendidikan juga penting untuk meningkatkan daya saing suatu negara di kancah global. Orang-orang perlu memiliki keterampilan abad ke-21 termasuk literasi digital, kreativitas, kerja tim, dan pemikiran kritis karena dunia menjadi lebih saling terhubung dan kompleks. Sistem pendidikan Indonesia harus cukup fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan pergeseran ini dan membekali siswa untuk menghadapi isu-isu di seluruh dunia. Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, telah beberapa kali menekankan nilai pembelajaran otonom dan reformasi pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang siap menghadapi angkatan kerja yang berubah dengan cepat.

Untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, seperti yang diuraikan dalam Visi Pendidikan Indonesia-untuk menghasilkan siswa-siswi Pancasila yang mampu berpikir kritis, kreatif, mandiri, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkolaborasi, dan merangkul keberagaman-kita membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Nadiem Makarim, telah mengajukan Surat Edaran No. 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Merdeka Belajar sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut. Merdeka Belajar, yang sering dikenal sebagai Freedom of Learning, adalah sebuah ideologi yang berusaha memerdekan institusi pendidikan sekaligus menginspirasi siswa untuk berpikir kreatif dan berkreasi. Dengan

mempertimbangkan tujuan jangka panjang pendidikan Indonesia, yaitu menghasilkan individu yang berdaya saing global, ide ini kemudian disetujui (Sibagariang et al., 2021, hlm. 89). Pendidikan di Indonesia merupakan salah satu bidang yang ingin ditingkatkan oleh inisiatif Freedom to Learn. Salah satu hal terbaik yang dapat dilakukan adalah dengan mengimplementasikan ide ini, yang akan menimbulkan banyak masalah di dalam kelas. Dalam rangka menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dengan Profil Pelajar Pancasila, kebijakan Merdeka Belajar membentuk kembali pendidikan di Indonesia. Kekuatan untuk mengontrol pendidikan dilakukan ketika sekolah dan pemerintah daerah diberi lebih banyak kelonggaran dalam hal pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Tentu saja, faktor-faktor ini berkaitan dengan konsep kebijakan Merdeka Belajar dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Nadiem Makarim menyatakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia saat ini gagal mendidik orang tua dan anak-anak tentang pentingnya perubahan iklim dan tantangan lingkungan. Sistem pendidikan modern terus menekankan pada hafalan materi ujian. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengubah sistem pendidikan di Indonesia. Praktik-praktik berkelanjutan dan pendidikan lingkungan adalah bagian dari hal ini. Mengapa? Karena dengan sistem pendidikan yang baru, anak-anak akan dapat menggunakan contoh-contoh dunia nyata untuk melengkapi apa yang mereka pelajari di kelas. Ketika berpikir tentang perubahan iklim, kata Nadiem, penting juga untuk mengingat pentingnya pengetahuan lokal. Menurutnya, pengetahuan tradisional memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan (Wicasksono, 2021).

Pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara industri. Hal ini terlihat dari beberapa hal, termasuk aksesibilitas sumber daya pendidikan seperti sekolah dan tenaga pengajar. Kepala sekolah saat ini lebih banyak berperan sebagai badan administratif dan

pengorganisasian, dengan sekolah sebagai alat untuk mencapai tujuan. Terdapat pendekatan kegiatan akademik dalam pengembangan dan implementasi kurikulum, bukan penekanan pada pemilik dan pencipta kurikulum di sekolah. Siswa diajar sesuai dengan usia kronologis mereka, bukan berdasarkan kemampuan bawaan mereka, dan guru dipandang sebagai satu-satunya pemberi informasi faktual, bukan sebagai pemandu dan pembimbing dalam pembelajaran siswa.

Inilah sebabnya, sejak bulan Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memperkenalkan empat kebijakan pembelajaran yang berbeda, yang disebut sebagai Merdeka Belajar episode satu sampai empat. (1) Mendorong hadirnya ribuan sekolah penggerak. (2) Program ini bertujuan untuk menyediakan 50.000 guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan untuk 5.000 PAUD, SD, atau SMP (sederajat) pada tahun 2022. (3) Organisasi penggerak diberikan kategori khusus berdasarkan rekam jejak mereka. (4) Untuk memastikan program ini sesuai dan dilaksanakan, dilakukan pemantauan dan evaluasi (Wahyuningsih, 2020).

Dengan memberikan contoh bagi sekolah-sekolah lain untuk diikuti dalam hal bagaimana mendirikan Sekolah Penggerak, meningkatkan pengaruh program terhadap lembaga pendidikan lainnya, dan mempercepat proses secara keseluruhan, program Sekolah Penggerak akan membantu meningkatkan standar pendidikan di wilayah tersebut dengan lebih cepat. Visi pendidikan Indonesia, seperti yang diartikulasikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, adalah untuk menghasilkan siswa-siswa Pancasila yang akan membantu mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, dan memiliki identitas yang berbeda. Kebijakan Kurikulum Merdeka adalah perwujudan dari ambisi ini. Proyek-proyek untuk meningkatkan visibilitas mahasiswa Pancasila merupakan ciri khas kurikulum Merdeka. Dengan profil pelajar Pancasila untuk setiap siswa di unit pendidikan, Kurikulum Merdeka

menyoroti upaya untuk memperkuat karakter bangsa: Sari dkk., 2022.

Profil pelajar Pancasila terdiri dari enam karakteristik yang harus dimiliki oleh semua siswa. Hal ini meliputi: 1) beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) mandiri; 3) bekerja sama dengan orang lain; 4) terbuka terhadap keragaman dalam skala global; 5) mampu berpikir kritis; dan 6) kreatif. Pendidikan Dasar dan Menengah, bersama dengan pihak lain (n.d.). Kombinasi antara ekstrakurikuler, proyek-proyek yang dirancang untuk memperkuat profil pelajar Pancasila, dan kegiatan intrakurikuler diperlukan untuk merealisasikan profil pelajar Pancasila.

Program Sekolah Penggerak diatur oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1177/M/2020, yang menetapkan pedoman pelaksanaan program. Diktum pertama menyatakan bahwa tujuan dari program ini adalah untuk mendorong terwujudnya profil Siswa Pancasila melalui peningkatan kompetensi siswa secara menyeluruh. Sesuai dengan diktum ketiga, langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan program Sekolah Penggerak adalah: a) mensosialisasikan program ini, b) memilih provinsi, kabupaten, atau kota sebagai penyelenggara program, c) memilih satuan pendidikan sebagai pelaksana program, d) melaksanakan kegiatan program di tingkat pemerintah daerah, e) melaksanakan kegiatan program di tingkat satuan pendidikan, dan f) melakukan penilaian terhadap keberhasilan program. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini, demikian diktum kelima. Sementara itu, Keputusan Menteri nomor 162/M/2021 memodifikasi Program Sekolah Penggerak (PSP) untuk memenuhi tuntutan pembaharuan pembelajaran, yang merupakan program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan berfungsi sebagai model satuan pendidikan berkualitas.

TK Xaverius, TK Aisiyah, SD STKIP Muhammadiyah, SD N 4 Koba, SD N 6 Sungaiselan, SD N 20 Sungaiselan, SMP N 5 Satu Atap Sungaiselan, dan SMP N 7 Sungaiselan merupakan beberapa sekolah yang terdaftar sebagai Sekolah Penggerak angkatan ke-2, dengan fokus sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten Bangka Tengah. Dua sekolah menengah pertama di Sungaiselan, SMP 5 Satu Atap dan SMP N 7, menjadi subjek dalam penelitian ini.

Rendahnya motivasi dan hasil belajar siswa, kurangnya dukungan orang tua, dan kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan merupakan masalah umum di SMP di Kabupaten Bangka Tengah. Selain itu, banyak sekolah tidak memiliki program untuk membantu anak-anak belajar lebih banyak, menangani masalah yang berkaitan dengan kemampuan dan karakter siswa, dan para pengajar kurang berinvestasi dalam pengembangan profesionalisme mereka. Selain itu, banyak lembaga pendidikan yang kurang menekankan pada hasil pembelajaran dan lebih mementingkan administrasi pendidikan dan prosedur yang terkait. Demikian pula dengan SMP Negeri 7 Sungaiselan yang mengalami masalah dalam penerapannya.

SMP Negeri 7 Sungaiselan memiliki 2 rombel kelas 7, 3 rombel kelas 8 dan 3 rombel kelas 9 pada tahun pelajaran 2022/2023 sehingga penerapan kurikulum merdeka dilaksanakan di kelas 7 yang terdiri dari kelas 7A dan 7B. SMP Negeri 7 Sungaiselan menerapkan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5 agar terlaksananya Kurikulum Merdeka dengan peserta didik yang memiliki Profil Pelajar Pancasila. Setiap Kelas 7 memiliki koordinator masing-masing untuk melaksanakan P5. Koordinator P5 bersama timnya yakni guru masing-masing yang mengajar di kelas 7A dan 7B. Pelaksanaan P5 tak luput dari kepemimpinan kepala sekolah yang dapat memengaruhi mutu sekolah. Kepala Sekolah berperan sebagai pelopor kepemimpinan Pancasila untuk membentuk P5 yang berkualitas.

Selama 2 tahun penerapan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

(P5) di SMP N 7 Sungaiselan, tak luput dari menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya sehingga memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut kelebihan tentang pelaksanaan P5 di SMP N 7 Sungaiselan : meningkatkan keterampilan peserta didik (dari berbagai tema yang dilakukan pada P5), pembelajaran yang kontekstual (tema yang dipilih memberikan pembelajaran secara nyata), meningkatkan motivasi diri peserta didik yang akan berimbas pada meningkatnya mutu atau kualitas Pendidikan terutama di SMP N 7 Sungaiselan. Namun dalam pelaksanaannya tak luput dari kekurangan yang ada, seperti : pengeluaran yang cukup tinggi (untuk tema tertentu dan kegiatan yang spesifik terkadang membutuhkan biaya yang cukup tinggi), sistem yang berubah sehingga membutuhkan waktu yang lebih banyak dalam persiapan, dan kurangnya tenaga ahli dalam pengajaran P5 karena tidak semua pendidik memiliki kemampuan atau keterampilan mengajar P5 sesuai tema yang diinginkan.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik dan berupaya melakukan penelitian lebih lanjut yang diharapkan dapat mengetahui secara jelas tentang **“Implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) pada Program Sekolah Penggerak (PSP) di SMP N 7 Sungaiselan**

1.2 Fokus dan subfokus Penelitian

Agar permasalahan yang akan dibahas lebih spesifik, mengingat luasnya permasalahan dan juga untuk menghindari penafsiran yang salah pada hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini serta karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya maka perlu adanya pembatasan masalah. Dalam penelitian ini masalah dibatasi hanya pada implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) pada Program Sekolah Penggerak (PSP) Angkatan 2 Tingkat SMP di Kabupaten Bangka Tengah.

Selanjutnya dirinci menjadi subfokus penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SMP N 5 Satu Atap Sungaiselan dan SMP N 7 Sungaiselan.
2. Program Sekolah Penggerak (PSP) di SMP N 5 Satu Atap Sungaiselan dan SMP N 7 Sungaiselan.
3. Peran kepemimpinan kepala sekolah dalam pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SMP N 7 Sungaiselan

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal di atas, beberapa masalah berikut ini telah diidentifikasi:

1. Bagaimana implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila pada Program Sekolah Penggerak Angkatan 2 Tingkat SMP Kabupaten Bangka Tengah?
2. Bagaimana faktor pendukung implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila pada Program Sekolah Penggerak Angkatan 2 Tingkat SMP Kabupaten Bangka Tengah?
3. Bagaimana kendala implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila pada Program Sekolah Penggerak Angkatan 2 Tingkat SMP Kabupaten Bangka Tengah?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian :

1. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana siswa Program Sekolah Penggerak Penggalang SMP Kabupaten Bangka Tengah angkatan kedua menjalankan Proyek Pancasila.
2. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji elemen-elemen yang akan membantu mewujudkan Proyek Penguatan Profil Peserta Didik Pancasila di tingkat Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Bangka Tengah sebagai bagian dari Program Sekolah Penggerak Angkatan 2.

3. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh sekolah menengah pertama di Kabupaten Bangka Tengah dalam melaksanakan Proyek Penguatan Profil Peserta Didik Pancasila sebagai bagian dari Program Sekolah Penggerak Angkatan 2.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis maupun teoritis :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu dan memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Manajemen Pendidikan Indonesia.

2. Secara Praktis

- 1) Bagi peneliti

Bagi para akademisi yang tertarik dengan Program Sekolah Penggerak, dan lebih khusus lagi Proyek Penguatan Profil Mahasiswa Pancasila, makalah ini akan memberikan wawasan yang berharga tentang keadaan terkini.

- 2) Bagi Ilmu Pengetahuan

Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu kemajuan pengetahuan tentang Program Sekolah Penggerak, khususnya Proyek Penguatan Profil Mahasiswa Pancasila, dan menjadi acuan bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa di masa mendatang.

- 3) Bagi Instansi

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas program P5 di sekolah-sekolah penggerak dengan memberikan gambaran yang tidak bias tentang pelaksanaan

program dan dampaknya.